

ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN KOTA SURABAYA 2013-2018

Yusuf Hariyoko^{1*}, Anggraeny Puspaningtyas²
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya^{1,2}
*)Korespondensi: yusufhari@untag-sby.ac.id

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government clause 29 verse 5 explains that "The strategy for accelerating regional development as referred to in clause (4) covers the priority of development and management of natural resources in the sea, acceleration of economic development, socio-cultural development, humans development resource, development of customary law related to sea management, and community participation in development. Economic growth is one indicator of economic success in Indonesia, but in the course of economic growth there are several economic problems. The main economic problems according to Adisasmita (2005: 201) are (i) consumption; (ii) production; (iii) distribution; and (iv) growth. Economic growth of Indonesia depends on the production of goods and services in the real sectors produced. Surabaya is the second largest city after Jakarta in Indonesia, it is important to explore local economic potential and regional economic competitiveness to encourage the acceleration of the regional economy. The potential of local economic may not be competitive with all districts in the East Java Economic Province. Location Quotient analysis can be a basic calculation method for determining the acceleration of economic development in a region. Based on the Location Quotient analysis, it can be seen that the three main potentials of the local economy are the company's service sector (LQ = 3,056); and the sector of providing accommodation and food drink (LQ = 2,818); financial and insurance sector (LQ = 1,937). It can be concluded that the leading sectors

Article Histori:

Accepted: 19/11/2019

Review: 6/10/2020

Publish: 31/10/2020

Keywords: local economy, economy potential

1. PENDAHULUAN

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi

di Indonesia telah diupayakan dan berlangsung sejak kemerdekaan dengan berbagai strategi, kebijakan dan program pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4 menyebutkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". PDB yang pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu,

atau merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) baik atas dasar berlaku maupun harga konstan. Berikut ini merupakan gambaran PDB dari tahun 2007-2016 dalam satuan milyar USD.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui berbagai dampak dari beberapa indikator yang mendukung aktivitas perekonomian. Beberapa indikator pembangunan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), prosentase keluarga miskin, tingkat pengangguran terbuka serta laju inflasi. Berkaca pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui lima tahapan periodisasi. Periode tahun 2014-2019 merupakan pembangunan jangka menengah tahap ketiga yang berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan tahap kedua ditujukan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dinamika ekonomi atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak berskala nasional tetapi juga internasional.

Permasalahan kualitas pertumbuhan ekonomi menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi;
2. Pertumbuhan ekonomi belum menstimulasi terjadinya pemerataan pendapatan antar wilayah yang

ditunjukkan oleh indeks ketimpangan wilayah yang masih tinggi;

3. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tinggi terbesar ditopang oleh kategori lapangan usaha, nontradable (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah;
4. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih belum mampu berkontribusi dalam permasalahan pengentasan kemiskinan.

Dengan mengacu pada hasil analisis location quotient (LQ) Kota Surabaya Tahun 2013-2017 maka dapat dikembangkan sebuah perencanaan sinergitas antara sektor unggulan dan sektor bukan unggulan. “Dengan kombinasi pendekatan sektor basis ekonomi dan pengalaman empiris, diharapkan dapat terwujud keterpaduan antara sektor basis dan sektor non basis sebagai unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang” (Ratnasari, 2014:21).

Perencanaan pembangunan Kota Surabaya jangka menengah 2016-2021 juga sudah memasukkan beberapa kebijakan khusus untuk mengembangkan potensi ekonomi unggulan dengan memasukkan isu-isu tentang komunikasi dan informatika, koperasi dan UMKM, serta penanaman modal. Isu-isu tersebut diterjemahkan menjadi beberapa isu turunan, sehingga akan mampu menciptakan solusi yang tepat dan peran pada sektor-sektor pembangunan.

Dasar perencanaan pembangunan ekonomi tersebut dapat digunakan sebagai basis model rencana pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Adapun tujuan penelitian yang penulis susun adalah untuk menganalisis potensi ekonomi lokal dan daya saing ekonomi Kota Surabaya sebagai dasar perencanaan ekonomi.

2. KAJIAN LITERATUR

Konsep administrasi pembangunan tidak lepas dari administrasi publik sebagai payung besar konsep yang banyak berkembang di Negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Waldo, “administrasi publik adalah manajemen

dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah” (Syafiie, 2006:99). Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat melalui proses sosial, ekonomi dan institusional, setidaknya pembangunan memiliki tujuan inti sebagaimana Todaro dan Smith mengemukakan ada tiga tujuan yaitu “1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, 2) peningkatan standar hidup, dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial” (Todaro dan Smith, 2006:28-29). Beberapa aspek tersebut harus terintegrasi dan disepakati bersama seluruh *stakeholders* agar tercipta pembangunan yang terukur, interaktif dan berkelanjutan. Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal (*Local Economic Resource Development/LERD*) pada dasarnya merupakan suatu proses yang berbasis komunitas atau kelompok dalam mengelola wilayah sesuai dengan sumberdaya yang ada, dalam mewujudkan peningkatan pendapatan ekonomi lokal, pertumbuhan wilayah, serta menumbuhkan lapangan pekerjaan baru. Unsur yang harus ditonjolkan adalah unsur lokal yang merupakan karakteristik masing-masing wilayah.

Menurut Blakely dan Bradshaw (2002:67) ada 4 komponen dalam menyeleksi strategi pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. *Locality;*
2. *Business and economic base;*
3. *Human resources;*
4. *Community resources.*

“Pendekatan sektoral untuk memacu pertumbuhan beberapa sektor yang potensial melalui berbagai kemudahan yang disediakan pemerintah termasuk rangsangan untuk percepatan pengembangannya. pengembangan lintas sektor untuk mengaitkan pengembangan antara satu sektor dengan sektor lainnya berdasarkan hubungan yang fungsional” (Sjafrizal, 2008:217).

Tom (2009) juga menyampaikan bahwa dalam “pembangunan ekonomi lokal seringkali mengalami permasalahan antara kualitas pembangunan dengan lingkungan dan pemerataan yang sesuai”. Namun, pembangunan yang dilakukan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang

mengintegrasikan peran masing-masing *stakeholders* menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan komprehensif. Contoh nyata dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal tersebut adalah proses pembangunan yang ada di China dan Amerika yang mengedepankan peran dari semua pihak yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Location Quotient* (LQ). Menurut Putra (2011:163) mengatakan bahwa analisis *Location Quotient* (LQ) adalah untuk mengetahui sektor mana yang ada di suatu daerah yang menjadi unggulan (komoditas) dan sektor mana yang tidak menjadi unggulan (atau pertumbuhannya negatif/defisit) dengan membandingkan suatu daerah dengan daerah di tingkat atasnya pada kurun waktu tertentu. *Location quotient* (LQ) dimaksudkan untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan sektor-sektor pembangunan di suatu wilayah dalam mendukung proses pembangunan di daerahnya. LQ merupakan suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah di atasnya atau wilayah referensi” (Hafizrianda dan Daryanto, 2010:20). “Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan produk domestik regional bruto (PDRB) suatu wilayah” (Adisasmita, 2008:21).

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018.

Tahap kedua adalah melakukan analisis potensi ekonomi lokal Kota Surabaya melalui perbandingan PDRB Kota Surabaya dengan PDRB Provinsi Jawa Timur menggunakan *location quotient analysis*. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung *location quotient* (LQ):

$$\text{Formula} \rightarrow \text{LQ} = \frac{x_{ir}/x_r}{x_{in}/x_n}$$

Keterangan rumus:

LQ = Location Quotient

1. Xir = Nilai PDRB sektor "i" pada tingkat wilayah yang lebih rendah
2. Xr = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah
3. Xin = Nilai PDRB sektor "i" pada tingkat wilayah yang lebih atas
4. Xn = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas

Dengan ketentuan hasil Location Quotient:

1. LQ > 1,0 yang berarti sektor komoditas (unggulan)
2. LQ < 1,0 yang berarti bukan merupakan sektor komoditas (defisit)

Tahap ketiga adalah dengan membandingkan hasil dari perhitungan sektoral dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh Kota Surabaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian penulis, bahwa penggalian potensi ekonomi lokal Kota Surabaya diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan di bidang ekonomi. Pendekatan umum yang digunakan dalam pengembangan potensi daerah salah satunya dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Muktianto dalam Sumiharjo, 2008:12). Penelaahan PDRB dilakukan untuk mencari sektor-sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Analisis sektor unggulan dapat dianalisis menggunakan analisis location quotient. Adapun dari hasil analisis location quotient adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Location Quotient

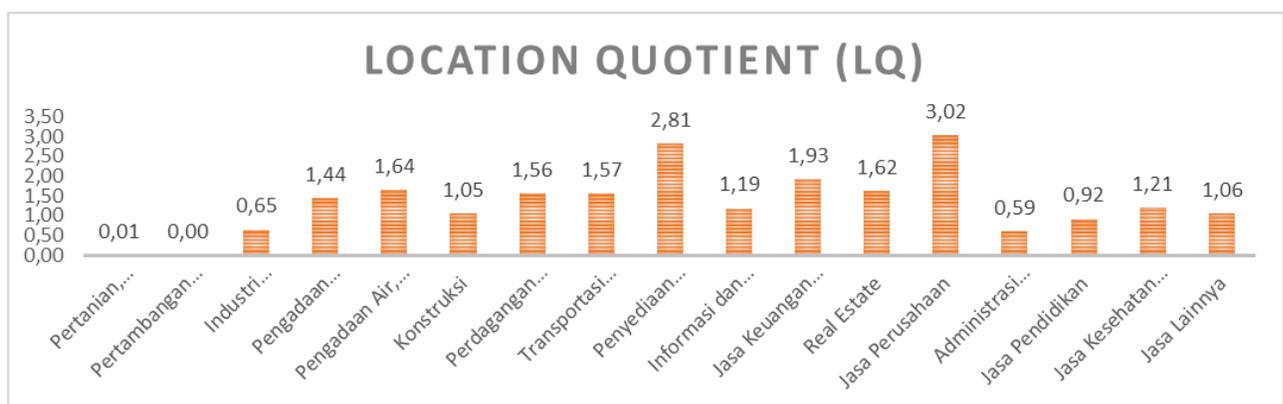
No	Sektor	Hasil LQ						Rata-Rata
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	0,66	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,65
4	Listrik dan Gas	1,59	1,48	1,45	1,39	1,38	1,34	1,44
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,68	1,68	1,66	1,63	1,62	1,58	1,64
6	Konstruksi	1,11	1,09	1,06	1,03	1,02	0,99	1,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,60	1,58	1,56	1,54	1,55	1,55	1,56
8	Transpostasi dan pergudangan	1,61	1,60	1,57	1,55	1,54	1,55	1,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	2,89	2,85	2,80	2,77	2,77	2,80	2,81
10	Informasi dan Komunikasi	1,22	1,21	1,20	1,18	1,16	1,17	1,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,96	1,97	1,94	1,92	1,89	1,89	1,93
12	Real Estate	1,64	1,64	1,62	1,63	1,58	1,59	1,62
13	Jasa Perusahaan	3,12	3,07	3,03	2,92	3,03	2,94	3,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,60	0,60	0,60	0,59	0,60	0,57	0,59
15	Jasa Pendidikan	0,93	0,93	0,92	0,91	0,92	0,89	0,92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,22	1,21	1,21	1,20	1,19	1,21
17	Jasa Lainnya	1,09	1,07	1,05	1,06	1,04	1,06	1,06

Sektor ekonomi unggulan Kota Surabaya dari tahun 2013-2018 dapat dilihat dari nilai rata-rata LQ. Sektor unggulan pertama Kota Surabaya pada tahun 2013-2018 adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 3,02. Sektor unggulan kedua Kota Surabaya adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai rata-rata LQ sebesar 2,81. Sektor unggulan ketiga Kota Surabaya adalah sektor jasa keuangan dan asuransi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,93. Sektor unggulan keempat Kota Surabaya adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,64. Sektor unggulan kelima Kota Surabaya adalah sektor real estate dengan nilai rata-rata LQ 1,62. Sektor unggulan keenam Kota Surabaya adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,57. Sektor unggulan ketujuh Kota Surabaya adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,56. Sektor unggulan kedelapan Kota Surabaya adalah sektor pengadaan listrik dan gas dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,44. Sektor unggulan kesembilan Kota Surabaya adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,21. Sektor unggulan kesepuluh Kota Surabaya

adalah sektor informasi dan komunikasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,19. Sektor unggulan kesebelas Kota Surabaya adalah sektor jasa lainnya dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,06. Sektor unggulan duabelas Kota Surabaya adalah sektor konstruksi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,05.

Sektor ekonomi yang tidak menjadi unggulan Kota Surabaya pada tahun 2013-2018 yang pertama adalah sektor jasa pendidikan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,92. Sektor yang tidak menjadi unggulan kedua Kota Surabaya adalah sektor industri pengolahan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,65. Sektor yang tidak menjadi unggulan ketiga Kota Surabaya adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,59. Sektor yang tidak menjadi unggulan keempat Kota Surabaya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,01. Sektor yang tidak menjadi unggulan kelima Kota Surabaya adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,00. Berikut merupakan grafik hasil analisis location quotient Kota Surabaya Tahun 2013-2018.

Gambar 1. Grafik Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Surabaya Tahun 2013-2018



Sumber: Hasil Olahan Peneliti PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya 2013-2018

Sektor-sektor unggulan di Kota Surabaya ada sebelas yaitu sektor jasa perusahaan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan

daur ulang; sektor real estate; sektor transportasi dan pergudangan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor jasa kesehatan

dan kegiatan sosial; sektor informasi dan komunikasi; dan sektor jasa lainnya.

Kesebelas sektor tersebut memiliki peran penting sebagai dasar untuk proses pembangunan yang ada di Kota Surabaya. Pada dasarnya, sektor-sektor yang sudah dipetakan akan mampu memberikan gambaran secara jelas peran dan kontribusi masing-masingnya pada proses pembangunan. Komitmen pemerintah untuk menciptakan sebuah pembangunan yang efektif, perlu mempertimbangkan pengoptimalan sektor yang sesuai. Hasil analisis yang secara jelas, memberikan gambaran bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sektor yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan, apabila sektor tersebut ditingkatkan dan dijadikan sebagai sasaran pembangunan sektoral akan memberikan peluang yang cukup terbuka lebar.

Pembangunan sektoral yang ada di Kota Surabaya sudah dilakukan dengan menyediakan OPD sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini sangat penting, karena setiap daerah memiliki potensi dan perlunya pendekatan yang berbeda dalam pembangunan masyarakat. Isu tentang pembangunan sektoral PDRB sesuai dengan hasil perhitungan per sektor sudah dimasukkan oleh pemerintah kota dengan diangkatnya isu "Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global".

Proses pengembangan daya saing global adalah langkah lanjutan yang dapat dilakukan pemkot surabaya setelah mempertimbangkan potensi ekonominya yang kemudian akan dibandingkan dengan daerah yang lain. Sehingga dengan adanya fokus pembangunan pada sektor tersebut memiliki dampak pembangunan yang lebih efisien.

Fokus pembangunan pada sektor jasa perusahaan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi sangat perlu untuk dipertimbangkan dengan baik. Alasan yang mendasarinya adalah adanya potensi yang tinggi dari sektor-sektor tersebut sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor tersebut juga tidak boleh lepas dari konsep pembangunan yang

disampaikan oleh Blakely dan Bradshaw (2002) dengan mengedepankan lokalitas, manusia, dan proses bisnisnya.

Dampak yang ditimbulkan juga perlu untuk diperhatikan dengan baik, karena melihat pengalaman pembangunan ekonomi sektoral yang disampaikan oleh Tom (2009) seringkali mengalami permasalahan antara kualitas pembangunan dengan lingkungan dan pemerataan yang sesuai. Isu tersebut sudah berusaha diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan memasukannya sebagai isu strategis berupa "keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi" yang kemudian diterjemahkan ke dalam program kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam usaha untuk mengembangkan LED pemerintah Kota Surabaya harus lebih fokus mengembangkan sektor unggulan yang berdaya saing. Sektor-sektor tersebut juga perlu diidentifikasi sesuai Blakely dan Bradshaw (2002:67) ada 4 komponen dalam menyeleksi strategi pembangunan ekonomi daerah yang bersifat lokalitas, berbasis ekonomi, sumberdaya manusia, dan sumber daya komunitas. Pengembangan tersebut juga harus mengedepankan masyarakat, sehingga mampu untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.

5. PENUTUP

Dari tujuh belas sektor yang ada di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya tahun 2013-2018, ada sebelas sektor yang menjadi sektor unggulan sehingga dapat menjadi dasar pendorong pengembangan ekonomi lokal. Adapun sektor unggulan Kota Surabaya adalah sektor jasa perusahaan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor real estate; sektor transportasi dan pergudangan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor informasi dan komunikasi; dan sektor jasa lainnya. Dalam perencanaan pengembangan ekonomi Kota Surabaya sudah masuk dalam isu strategis

RPJMD. Namun, masih belum menunjukkan sejauh fokus pembangunan pada sektor yang dijadikan daya saing.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disusun saran untuk mengembangkan ekonomi Kota Surabaya lebih berfokus pada sektor-sektor unggulan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga sinergitas program-program antar organisasi perangkat daerah yang dicantumkan pada dokumen perencanaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2008. *Regional Development: Concepts and Theories*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Blakely, Edward J, and Ted K. Bradshaw. 2003. *Planning local economic Development (theory dan practice)*. Third edition. Vistaar Publication: New Delhi
- Hafizrianda, Yundy, and Arief Daryanto. 2010. *Quantitative Models for Regional Economic Development Planning (Concepts and Applications)*. Bogor: PT Publisher IPB Press.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Dasar 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara. Lembaran Negara RI, No. 4421. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Kota Surabaya. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Surabaya
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025. Surabaya
- Putra, Fadillah. 2011. *Study of Public Policy and Government in Quantitative Perspectives (Techniques, Methods and Approaches)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sjafrizal. 2008. *Regional Economics (Theory and Application)*. Padang: Pranita Offset.
- Sumiharjo, tumar. 2008. *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*. Bandung: Puskomedia
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga
- Tom Liou, Kuotsai. 2009. *Local Economic Development in China and the United States: Strategies and Issues*. Public Administration Review 3(1): S29-S37.